**Materi interview untuk Sesi 3 SPADA Kebijakan Luar Negeri RI: Periode Orde Baru 1966 – 1998:**

1. Ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno tantangan utama yang dihadapinya adalah persoalan legitimasi kekuasaan. Selain **konsolidasi basis kekuasaan** di dalam negeri yang berujung pada tampilnya Golongan Karya sebagai “partai penguasa”, maka kebijakan luar negeri juga dijadikan alat untuk membangun **legitimasi** melalui **pembangunan ekonomi**. Untuk itu Soeharto merumuskan kebijakan luar negeri dengan sikap pragmatisme di mana Indonesia mulai membuka diri kepada dunia Barat baik untuk pinjaman luar negeri (IGGI) maupun investasi asing. Keberhasilan pembangunan ekonomi menjadi basis legitimasi jangka panjang Soeharto selain dukungan militer melalui konsep Dwifungsi ABRI. **Bukan retorika ideologis** tetapi kekuatan internal melalui pembangunan ekonomi yang membuat Indonesia dihargai bangsa lain. Demikian keyakinan Soeharto. Karena **dekat dengan Barat** (AS), Soeharto dianggap sebagai sahabat Barat (AS) untuk **membendung komunisme di Asia Tenggara**.
2. Soeharto juga menetapkan basis ideologi yang jelas bagi terwujudnya Indonesia yang stabil dengan kembali menekankan Pancasila sebagai ideologi negara meskipun dalam pelaksanaannya Pancasila hanya menjadi justifikasi untuk pemerintahan yang otoriter dan melanggar hak azasi manusia.
3. Pendekatan keamanan merupakan instrument utama Soeharto membangun stabilitas dan kelanggengan kekuasaannya. Untuk itu militer (ABRI) merupakan tulang punggung kekuasaannya melalu praktik Dwifungsi ABRI. Tetapi efeknya adalah pelanggaran HAM yang kemudian menjadi isu utama setelah berakhirnya Perang Dingin awal tahun 1990an ketika Barat mulai meninggalkan Soeharto.
4. Dominasi militer dan sikap anti-komunisme merupakan faktor utama di balik invasi ke Timor Timur awal tahun 1970an yang kemudian diikuti okupasi atau pendudukan wilayah jajahan Portugal tersebut dan jalan panjang perjuangan diplomasi Indonesia selama 1980an dan 1990an yang berujung pada jajak pendapat tahun 1999 yang dimenangkan oleh kubu pro-kemerdekaan dan biaya yang sangat mahal di mana Indonesia harus menerima resolusi DK PBB untuk intervensi kemanusiaan di Timor Timur mengatasi pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan di wilayah itu. Dalam konteks Perang Dingin tahun 1970an dunia Barat dan Australia secara diam-diam mendukung invasi Indonesia ke Timor Timur.
5. Untuk memahami kebijakan luar negeri Orde Baru di bawah Presiden Soeharto kita perlu kilas balik melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno setidaknya dari awal 1960an sampai pada peristiwa G 30 S PKI tahun 1965.
	1. Pada tahun 1950an dan awal 1960an Asia Tenggara menjadi ajang rebutan pengaruh negara-negara besar terkait Perang Dingin yang mencapai puncaknya pada Perang Vietnam di mana AS mendukung Vietnam Selatan dan Uni Soviet mendukung Vietnam Utara.
	2. Ketika Inggris mendukung pembentukan Negara Federal Malaysia, Presiden Soekarno memberi reaksi keras karena dianggapnya sebagai proyek neo-kolonialisme dan neo-imperialisme sehingga keluar dengan kebijakan Konfrontasi dengan Malaysia.
	3. Tiongkok juga dituduh mendukung Gerakan 30 September PKI tahun 1965 untuk memperluas pengaruh komunisme di Asia Tenggara.
6. Bertolak dari fakta-fakta ketidakstabilan regional di atas muncul pemikiran Soeharto untuk mencari cara menciptakan stabilitas dan keamanan regional di Asia Tenggara yang dimulai dengan rekonsiliasi dengan Malaysia dan ikut mendirikan ASEAN pada 8 Agustus 1967. Inilah awal dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia mengandalkan platform regional ASEAN menghadapi negara-negara besar seperti AS, Uni Soviet, China dan India sehingga mereka tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada negara-negara Asia Tenggara.
7. Pemikiran tentang pentingnya ASEAN sebagai platform regional dalam rangka menciptakan stabilitas kawasan merupakan fondasi atau cikal bakal dijadikannya ASEAN sebagai cornerstone kebijakan luar negeri Indonesia sampai sekarang. Tetapi di mata negara-negara ASEAN yang lain ASEAN juga dilihat sebagai mekanisme untuk “menjinakkan” Indonesia agar tidak mengulangi kebijakan agresif dan konfrontatif yang pernah dilakukan Soekarno pada masa lalu. Selamat tahun 1980an dan 1990an Indonesia menjadikan ASEAN sebagai pendukung utama untuk kebijakan pendudukannya di Timor Timur.
8. Tonggak penting kebijakan luar negeri RI terkait ASEAN pada masa Orde Baru:
	1. Tahun 1971 dikeluarkannya Deklarasi ZOPFAN (Asia Tenggara sebagai *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*).
	2. 1976 penetapan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) – penyelesaian konflik secara damai dan tidak menggunakan kekuatan militer. Disebut juga *Bali Concord I*.
	3. Awal tahun 1990an dimulainya *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA).
9. Kebijakan luar negeri Soeharto dari tahun 1966 sampai dengan 1998 ketika Soeharto jatuh dari kekuasaannya di bagi menjadi dua sub-periode[[1]](#footnote-1):
	1. Periode pertama 1966 sd pertengahan tahun 1980an disebut juga periode di mana Soeharto menjalan kebijakan luar negeri yang *low profile* karena masih konsentrasi pada konsolidasi kekuasaan domestik dan pembangunan ekonomi untuk mendukung stabilitas dan legitimasi kekuasaan Soeharto. Indonesia tidak banyak menonjolkan diri dalam diplomasi internasional.
	2. Sejak pertengahan tahun 1980an ketika pembangunan ekonomi mulai membuahkan hasil dan stabilitas dalam negeri terbentuk Indonesia memiliki kepercayaan diri untuk menjalan kebijakan luar negeri yang high profile dengan melakukan berbagai inisiatif secara regional maupun multilateral.
		1. Diawali dengan perayaan 30 tahun Konferensi Asia Afrika 1985
		2. Indonesia aktif di OIC (Organization of Islamic Conference)
		3. Indonesia aktif menyelesaikan konflik di Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting (JIM)
		4. Indonesia membuka kembali hubungan diplomatic dengan Tiongkok tahun 1990 setelah dibekukan pada tahun 1967 setelah kejadian G 30 S PKI tahun 1965.
		5. Indonesia menjadi Ketua Gerakan Nonblok pada tahun 1992.
		6. Indonesia menjadi tuan rumah *APEC Meeting* tahun 1994 yang menghasilkan *Bogor Declaration* – langkah menuju perdagangan bebas untuk kerja sama Asia Pasifik ini.
10. Sejak berakhirnya Perang Dingin dan bubarnya Uni Soviet tahun 1989 dunia Barat (AS) mulai meninggalkan Soeharto dan isu-isu baru mulai muncul dalam hubungan internasional seperti isu demokrasi, HAM dan lingkungan hidup. Soeharto menjadi sasaran kritik dunia Barat karena pelanggaran HAM di Timor Timur dan penindasan terhadap kebebasan politik dalam negeri. Soeharto juga mulai mempersepsikan ancaman terhadap kekuasaannya sehingga merasa perlu merangkul kelompok Islam untuk memperkuat basis kekuasaannya.
11. Krisis ekonomi yang dimulai tahun 1997 yang dikombinasikan dengan kekuasaan politik Soeharto yang semakin goyah menjadi awal kejatuhan Soeharto dan proyek pembangunan ekonominya yang membawa Indonesia ke jurang bahaya pergolakan politik dan disintegrasi. Persatuan dan stabilitas yang dibangun Soeharto selama 32 tahun ternyata sangat rapuh dan Indonesia harus memulai lagi dari awal untuk pulih dari krisis ekonomi serta membangun kelembagaan kenegaraan (reformasi politik) serta pembangunan kebangsaan yang lebih berkelanjutan dengan biaya sosial politik yang lebih rendah.
1. Rizal Sukma (1995). “The Evolution of Indonesia’s Foreign Policy: An Indonesian View”. *Asian Survey*, March, [↑](#footnote-ref-1)